

# EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPR SYARIAH (Studi kasus di BPRS Bhakti Haji Malang)

 Oleh: CAMILIA ABDLAT ( 02620038 )

accounting

Dibuat: 2007-04-04 , dengan 3 file(s).

**Keywords:** Perlakuan akuntansi dan Murabahah

Penelitian ini merupakan studi kasus pada BPRS Bhakti Haji Bululawang- Malang dengan topik “Evaluasi Perlakuan Akuntansi terhadap Sistem Pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah” Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti tentang bagaimana perlakuan akuntansi transaksi jual beli pada produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah Bhakti Haji Malang, dan untuk membuktikan kesesuaian perlakuan akuntansi transaksi jual beli pada produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah Bhakti Haji Malang dengan ketentuan menurut PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi terhadap system pembiayaan murabahah. Adapun langkah- langkahnya adalah mengidentifikasi perlakuan akuntansi produk pembiayaan murabahah yang meliputi pengukuran, pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Haji Malang. Membandingkan perlakuan akuntansi prinsip jual beli produk pembiayaan murabahah pada BPRS Bhakti Haji Malang dengan PSAK No. 59 dan merumuskan hasil perbandingan perlakuan akuntansi prinsip jual beli produk pembiayaan murabahah pada BPRS Bhakti Haji Malang dengan PSAK No. 59 untuk menilai kesesuaian atau kepatuhan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah.

Dari hasil analisis tersebut, BPRS Bhakti Haji Malang dalam melakukan penilaian pembiayaan menggunakan prinsip- prinsip yang berlaku pada lembaga perbankan yaitu prinsip 5C. dalam system pembiayaan murabahah yang ada pada BPRS Bhakti Haji Malang tidak mengenakan uang muka atau tidak mengakui adanya uang muka (urbun). BPRS Bhakti Haji Malang hanya melayani pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan saja, karena keterbatasan tempat sehingga tidak ada pembiayaan murabahah tanpa pesanan. Karena keterbatasan tenaga kerja dan tempat, maka pada saat akad murabahah disepakati, pihak BPRS Bhakti Haji Malang memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk diberikan amanah oleh pihak BPRS untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dalam hal ini pihak BPRS membayar kepada nasabah sejumlah yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli barang- barang tersebut. Secara keseluruhan, perlakuan akuntansi BPRS Bhakti Haji Malang mulai dari aktivitas pengukuran, pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK No. 59 meskipun masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 59. Pertama, yaitu dalam hal pengakuan potongan pelunasan. Kedua, yaitu dalam hal penyajian laporan keuangan Neraca dalam hal menyajikan rekening dengan nama “Investasi tidak terikat” tanpa ada pengklasifikasian berdasarkan sumber dana. Ketiga, yaitu dalam hal penyajian laporan keuangan Laba- Rugi yang tidak menyajikan rekening pendapatan margin murabahah dan pada point pendapatan operasional, pendapatan- pendapatan digabung menjadi satu tanpa ada pengklasifikasian pendapatan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan agar BPRS Bhakti Haji Malang, sebaiknya dalam hal penyajian laporan keuangan Neraca pada bagian aktiva, pada point rekening investasi

tidak terikat ada pengklasifikasian berdasarkan sumber dana, pada laporan keuangan Laba- Rugi seharusnya mencantumkan rekening pendapatan margin murabahah, karena jual beli murabahah merupakan pendapatan utama dalam pembiayaan pada BPRS Bhakti Haji Malang, dan seharusnya dalam perlakuan akuntansi sistem pembiayaan murabahah khususnya penyajian laporan keuangan Neraca dan Laba- Rugi disamping mengacu pada PSAK No. 59 juga mengacu pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia).

This research is a case study on the BPRS Bhakti Bululawang Haji Malang on the topic "Evaluation of Accounting Treatment of Murabaha Financing System in Rural Sharia"

The purpose of this study was to provide evidence of how the accounting treatment of sale and purchase transactions in products murabahah in BPRS Bhakti Haji Malang, and to prove the suitability of the accounting treatment of sale and purchase transactions in products murabahah in BPRS Bhakti Haji Malang with the provisions under SFAS No. 59 on Accounting for Islamic Banking.

The analytical tool used is descriptive analytical that is give a description of the accounting treatment of murabahah system. As for the steps is to identify the accounting treatment murabahah products that include measurement, recognition, recording and presentation of financial statements conducted by the BPRS Bhakti Haji Malang. Comparing the accounting treatment of the principle of buying and selling products on the BPRS Bhakti murabahah Haji Malang with SFAS No. 59 and formulating the results of comparison of the accounting principle of buying and selling products on the BPRS Bhakti murabahah Haji Malang with SFAS No. 59 for assessing the suitability or compliance with the accounting treatment murabahah.

From the analysis, the BPRS Bhakti Haji Malang in assessing the financing using the principles that apply to banking institutions that is the principle of 5C. in the existing system murabahah in BPRS Bhakti Haji Malang was not wearing a down payment or do not acknowledge the advances (urbun). BPRS Bhakti Haji Malang murabahah serve only by order only, due to limited places so that no murabahah without orders. Due to limited manpower and space, so when murabahah agreed, the BPRS Bhakti Haji Malang give power of attorney to clients to be given the mandate by the SRB to purchase the items required. In this case the SRB pay the customer a number that is needed by customers to purchase these items.

Overall, the accounting treatment of BPRS Bhakti Haji Malang start of activity measurement, recognition, recording and presenting the financial statements are in accordance with existing provisions of SFAS No. 59 although there are still some matters that are not in accordance with SFAS No. 59. First of all, namely in terms of recognition of the settlement discount. Secondly, namely in terms of preparing the consolidated financial balance in terms of presenting an account with the name "Unrestricted investments" without any classification by source of funds. Third, that in terms of presenting the financial statements Profit and loss account does not present murabahah margin and operating income at the point, revenues would be combined into one with no income classification.

Based on the above conclusions, the researchers suggested that SRB Bhakti Haji Malang, preferably in terms of preparing the consolidated financial balance at the property, on unrestricted investment accounts point is the classification by source of funds, the financial statements should include the Profit and Loss account murabahah margin, because the selling buy murabaha is the main income in the financing of the BPRS Bhakti Haji Malang, and should the accounting treatment system murabahah especially the presentation of financial statements Balance Sheet and Profit and Loss in addition to referring to SFAS No. 59 also refers to the PAPSI (Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines).